

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan kumpulan penjelasan ilmiah yang digunakan sebagai pedoman dan informasi dalam melakukan penelitian. Kajian Pustaka berisi uraian mengenai bidang atau topik tertentu.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kegiatan komparatif yang sedang dikerjakan penulis dengan peneliti sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, dan juga berfungsi memberikan inspirasi bagi peneliti untuk meneliti kembali tentang penelitian serupa.

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

Nama (<i>Name</i>)	Fransiskus Roland Muti, Agustinus L. Tiza S.Sos.,M.AP dan Stefanus Bekun S.Sos., M.AP	Rachma Waty Fazry	Novi Handian, Aan Anwar Sihabudin, Iis Sujai
Jenis Luaran Laporan Penelitian	Jurnal Poros Politik	Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara	Jurnal Administrasi Publik
Tahun	2022	2019	2022
Universitas (<i>University</i>)	Universitas Timor	Universitas Subang	Universitas Galuh
Judul (<i>Title</i>)	Implementasi Kebijakan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Rumah Sebagai Sumber Pangan dan Gizi Dalam Mengatasi Masalah Stunting di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara	Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang	Implementasi Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

<p>Latar Belakang (<i>Historical Background</i>)</p>	<p>Dilatarbelakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama. Ketahanan pangan dan gizi bukan hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi juga kandungan gizi di dalamnya. Stunting merupakan keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi. Stunting menjadi focus pada target perbaikan gizi pada tahun 2025. Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi</p>	<p>Dilatarbelakangi oleh Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas, yang menjadi unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang. Pemerintah Kabupaten Subang lebih fokus kepada kelompok pangan sayur dan buah. Dimana Pemerintah Kabupaten Subang gencar melakukan optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam rangka mendukung Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi</p>	<p>Dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menuntut pemenuhan penyediaan makanan dan perluasan daerah pemukiman. Pekarangan mempunyai peluang untuk dikembangkan sehingga secara optimal dapat menopang kehidupan masyarakat. Pada pengembangan potensi pekarangan perlu adanya program yang terencana. Program yang terencana dalam pemanfaatan pekarangan bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengelola yang melaksanakan kegiatan. Pekarangan sebagai salah satu praktek sederhana, sangat dekat dengan kegiatan masyarakat sehari-hari dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengadakan apotik hidup serta sebagai penyediaan bahan pangan rumah tangga. Berdasarkan Surat Keputusan Badan Ketahanan Pangan (2019)</p>
--	---	---	--

	<p>spesifik dan gizi sensitif. Desa Hauteas dengan prevalensi stunting tertinggi 67,61%. Masalah ketahanan pangan tersebut akibat adanya anomali iklim dimana kekeringan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan lahan pertanian khususnya sawah tadah hujan gagal tanam dan kehilangan hasil panen, komoditi lain pun seperti jagung, dan kacang - kacangan mengalami hal yang sama. Hal tersebut mengakibatkan rumah tangga petani mengalami kekurangan bahan pangan yang berdampak pada asupan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui dan bayi balita mengalami kekurangan gizi kronis yang berdampak pada</p>	<p>Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal di Kecamatan Cibogo. yang dinilai masih kurang, pemanfaatannya belum dilakukan secara maksimal. Mayoritas masyarakat kecamatan Cibogo masih memanfaatkan lahan pekarangan seadanya saja, padahal jika dioptimalkan dapat ditanami beragam jenis tanaman yang bisa memenuhi ketersediaan pangan bagi keluarga. Terdapat beberapa permasalahan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang belum optimal: sosialisasi belum berjalan sesuai dengan tujuan</p>	<p>melalui Pusat Pangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 telah melaksanakan Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Desa Karanganyar adalah salah satu Desa di Wilayah Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yang mendapatkan program pekarangan pangan lestari ini yang merupakan faktor pendorong warga untuk mengembangkan tanaman pangan maupun peternakan serta perikanan skala kecil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Implementasi kebijakan program P2L (Pekarangan Pangan Lestari) di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapannya masih mendapatkan beberapa kendala</p>
--	---	--	--

	<p>stunting. Kondisi lainya yaitu potensi lahan pekarangan yang cukup luas namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Dalam hal ini pemerintah Desa Hauteas Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan gerakan pemanfaatan pekarangan dengan baik kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan potensi lahan pekarangan yang ada dengan baik.</p>	<p>diharapkan, masih kurangnya sumber manusia sebagai pelaksana yang mempunyai kemampuan dalam menyampaikan materi disertai dengan metode penyampaian yang menarik, unik dan tepat sasaran. Komitmen dari penyuluh yang masih setengah-setengah. Dan Belum mempunyai Unit Pelaksana Teknis, sehingga untuk pelaksanaan teknis terkait sosialisasi kewalahan.</p>	<p>permasalahan yaitu belum optimalnya implementasi kebijakan program pekarangan pangan lestari diantaranya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komunikasi yang terjalin antara pelaksana program Pekarangan pangan lestari dengan kelompok sasaran program. 2. Minimnya sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program pekarangan pangan lestari. 3. Kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pendamping desa. 4. Kurangnya Sosialisasi ke anggota kelompok pelaksana program pekarangan pangan lestari.
--	---	--	---

<p>Konteks Kekinian terkait dengan Topik (<i>Current Context</i>)</p>	<p>Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan di Desa Hauteas Barat Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara pada penerapan kebijakan Gerakan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Sumber Pangan Dan Gizi dalam mengatasi masalah stunting</p>	<p>Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan di Kecamatan Cibogo Subang serta faktor yang menjadi penentu berhasil tidaknya proses implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang</p>	<p>Implementasi kebijakan program pekarangan pangan lestari pendorong warga untuk mengembangkan tanaman pangan maupun peternakan serta perikanan skala kecil dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, terobosan dalam menghadapi perubahan iklim melalui pemanfaatan pekarangan dalam mendukung ketersediaan serta diversifikasi pangan. Diharapkan dapat bermanfaat, baik terhadap peningkatan pendapatan Kelompok Wanita Tani, maupun peningkatan pemenuhan asupan gizi keluarga, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani di pedesaan</p>
<p>Teori-Teori yang telah dan sedang dipergunakan peneliti lain (<i>Theories Underpinning</i>)</p>	<p>Kebijakan yang di Idealkan, Kelompok Sasaran, <i>Implementing Organization, dan environmental factor</i></p>	<p>Teori yang C. Edwards III (Subarsono, 2011:90), keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat ditentukan oleh empat variable, yaitu: 1. Komunikasi 2. Sumber Daya</p>	<p>G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program: 1. Kondisi lingkungan 2. Hubungan antar organisasi 3. Sumber daya organisasi</p>

		3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi	4. Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana 5. Kinerja dan dampak
Mendudukan terminologi-terminologi yang relevan yang dipergunakan dalam berbagai penelitian sejenis (<i>Terminology</i>) Metode Penelitian	Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Dengan menggunakan analisis interaktif yang dikemukakan Miles dan Huberman melalui pengumpulan data, penyajian data, reduksi data dan kesimpulan	Metode penelitian pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumen, studi kepustakaan, dan observasi.	Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan, dokumen, gabungan. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.
Penjelasan bukti-bukti terkait pentingnya topik riset ini (<i>Significant</i>) Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kebijakan yang di idealkan belum sepenuhnya menyadari masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi, Kelompok sasaran dalam hal ini masyarakat,	Hasil dari penelitian difokuskan pada teori telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, maka dengan ini ditarik indikator-indikator yang digunakan yaitu: 1. Komunikasi, Dinas Ketahanan pangan kepada instansi atau dinas terkait dalam	Hasil dari penelitian pada variabel kondisi lingkungan berdasarkan wawancara informan bahwa lingkungan masih kurang aman, karena masih banyak faktor penghambat yang bisa merusak tanaman, dari hasil observasi dari segi lingkungan untuk kegiatan ini masih ada faktor alam yang menghambat dan bahkan sampai merusak kegiatan ini berjalan yaitu gangguan dari hewan liar yang

	<p>belum sepenuhnya menaati kebijakan yang di berikan pemerintah. Struktur organisasi pada kantor Desa Hauteas Barat sudah tertata dengan baik berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa. <i>Environmental Factor</i> (faktor lingkungan) merupakan salah satu unsur yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dimana sebagian masyarakat sangat terbiasa dengan sosial budaya yang ada yang mengharuskan masyarakat</p>	<p>pengembangan KRPL belum jelas dan belum dilaksanakan dengan baik, terlihat dari jadwal kegiatan rapat internal yang belum berjalan secara berkesinambungan. pelaksanaan</p> <p>2. Sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya alam belum sepenuhnya mendukung. Ini dilihat dari hasil penelitian bahwa sosialisasi yang dilakukan belum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Disisi lain belum terdapat pelaksana teknis dan belum terdapat semua peralatan yang diperlukan</p>	<p>merusak tanaman pada saat malam hari. Pada variabel hubungan antar organisasi, komunikasi antar masyarakat dengan pegawai desa, banyak masyarakat peserta program ini sulit mendapatkan informasi ataupun menjalin komunikasi dengan pihak desa. karena selain jarak yang jauh, sedikitnya pihak desa yang berkunjung ke Dusun lainnya menjadi faktor kurangnya komunikasi. Pada variabel sumber daya organisasi pada indicator sumber daya manusia peserta kegiatan Pekarangan Pangan lestari (P2L) ini mempunyai kemampuan di bidang bercocok tanam. Hal ini terlihat ketika para peserta menanam dan juga merawat tanaman mereka, indicator sumber daya finansial banyak anggota yang menggunakan uang kas organisasinya untuk kegiatan ini. Seharusnya itu tidak perlu, pihak Desa lah yang harus menanggung semua biaya untuk kegiatan ini. Pada variabel karakteristik</p>
--	--	---	---

	<p>untuk tidak mengkonsumsi tanaman yang mengandung gizi salah satunya adalah pohon kelor disebabkan karena faktor pemali atau pantang. Hal tersebut membuat masyarakat belum dapat melaksanakan program pemanfaatan pekarangan dengan sepenuhnya. Selain itu dengan tidak mengindahkan kebijakan dari pemerintah akan memberi dampak terhadap perkembangan kehidupan masyarakat di mana akan mengalami kerawanan pangan dan keterbatasan asupan gizi</p>	<p>untuk melaksanakan KRPL ini</p> <p>3. Penyuluh penyuluh mempunyai komitmen yang tinggi dalam mewujudkan ketahanan pangan, namun sosialisasi yang dilakukan masih belum bersifat kesinambungan.</p> <p>4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang saat ini belum memiliki Unit Pelaksana Teknis padasetiap kecamatan sehingga sedikit mengalami kewalahan untuk menjalankan sosialisasi di luar kantor</p>	<p>dan kapabilitas instansi pelaksana pihak Desa sudah mensosialisasikan kebijakan dan SOP yang berjalan untuk program ini. Sedangkan berdasarkan hasil observasi menunjukkan fakta di lapangan jika masih banyak yang kebingungan dengan SOP, kegiatan ini telah menunjukkan sikap profesionalnya, baik dari peserta maupun dari pihak Desa. Pada variabel kinerja dan dampak masih banyak gagal panen, hal ini disebabkan oleh cuaca dan juga gangguan dari hewan liar, seluruh peserta terbantu sedikit dengan adanya program ini, karena ada bahan masakan dan juga bumbu yang ditanam sendiri dan bisa dikonsumsi, yang dimana sebelumnya mereka harus membeli kewarung.</p>
--	---	--	---

Penjelasan keunggulan penelitian yang kita lakukan (<i>Research Gap</i>)	Berfokus pada penerapan kebijakan oleh pemerintah Desa Hauteas yang memiliki peran penting dalam mengimplementasikan gerakan pemanfaatan pekarangan dengan baik kepada masyarakat terkait pengelolaan potensi lahan pekarangan yang ada dengan baik. sebagai sumber pangan dan gizi dalam mengatasi masalah stunting di desa Hauteas.	Berfokus pada implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Subang Dinas Ketahanan Pangan dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang. Terdapat penjelasan terkait hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan yang ada.	Berfokus pada Implementasi Kebijakan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Di Desa Karanganyar sudah sangat layak kemampuan bertani dari peserta yang mengikuti kegiatan program ini maka dari itu hasil panennya hanya sedikit yang mengalami kegagalan dan masih bisa dimaksimalkan.
--	---	--	--

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2023

2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi dalam arti sempit yaitu dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang diartikan sebagai kegiatan tata usaha kantor atau pekerjaan tulis menulis (*clerical work*) seperti penulisan surat menyurat, steno, agenda, pembukuan dan pekerjaan catat mencatat lainnya. Administrasi dalam arti luas dari kata *Administration* (bahasa Inggris) diartikan sebagai kegiatan suatu kelompok yang bekerjasama terdiri dari dua orang atau lebih yang terdapat semua usaha kelompok, negara atau swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut **Leonardo D. White** yang dikutip oleh **Indra Muchlis** dan **Sufian Hanim (2013:9)** dalam bukunya **Administrasi, Organisasi dan Manajemen**, administrasi merupakan suatu proses kerjasama yang terdapat pada semua usaha kelompok, pemerintah maupun swasta, sivil maupun militer, skala besar maupun kecil.

Berdasarkan pernyataan tersebut, bahwa administrasi merupakan suatu proses kolaboratif yang terjadi di semua kelompok, pemerintah dan swasta, militer, pada skala besar maupun skala kecil.

Pengertian administrasi menurut **H.A. Simon dkk** yang dikutip oleh **Indra Muchlis** dan **Sufian Hanim (2013:10)** dalam bukunya **Administrasi, Organisasi dan Manajemen**, administrasi sebagai kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Berdasarkan pendapat tersebut bahwa administrasi merupakan kegiatan kerjasama kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Kemudian menurut **The Liang Gie** yang dikutip oleh **Indra Muchlis** dan **Sufian Hanim (2013:10)** dalam bukunya **Administrasi, Organisasi dan Manajemen**, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi administrasi menurut ahli diatas, maka penulis merumuskan definisi administrasi merupakan keseluruhan rangkaian proses kerjasama sekelompok orang baik sekala besar atau kecil untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut **Indra Muchlis** dan **Sufian Hanim** dalam bukunya yang berjudul

Administrasi, Organisasi dan Manajemen, Ciri-ciri administrasi antara lain:

- 1) Adanya kelompok manusia yaitu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih
- 2) Adanya kerjasama dari kelompok tersebut
- 3) Adanya kegiatan/proses/usaha
- 4) Adanya bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan
- 5) Adanya tujuan.

2.1.3 Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik merujuk pada kegiatan manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan layanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi publik melibatkan pengelolaan organisasi pemerintah dan pelaksanaan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Huges (1994)** yang dikutip oleh **Sitna (2022:75)** dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Administrasi Publik**, Administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain.

Sedangkan menurut **Chandler dan Plano (1988)** yang dikutip oleh **Sitna (2022:75)** dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Administrasi Publik**, Administrasi publik adalah suatu proses di mana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan dan mengimplementasikan dan mengelola keputusan dan kebijakan publik

Pengertian administrasi publik menurut **Ibrahim (2007)** yang dikutip oleh **Sitna (2022:75)** dalam bukunya yang berjudul **Pengantar Administrasi Publik**, menyatakan bahwa:

“Administrasi publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manajemen pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.”

2.1.4 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan jenis tindakan Administrasi Negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang-undang. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah dalam hal ini bisa juga disebut sebagai kebijaksanaan.

Kebijakan menurut **Aminullah** (dalam **Muhammadi, 2001: 371-372**) yang dikutip oleh **Uddin B. Sore** dan **Sobirin (2017:2)** dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik**, kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka Panjang dan menyeluruh.

Menurut **Dr Abd Halil** dan **Prof. Dr. Thaja (2019:118)** dalam buku **Kebijakan Publik** mendefinisikan kebijakan merupakan keputusan tetap yang

ditandai oleh perilaku yang konsisten dan representatif dari pihak yang membuat dan pihak yang melaksanakan.

Menurut **Anderson (1994: 5)** yang dikutip dalam **Prof. Muchlis Hamdi (2014:36)** dalam buku yang berjudul “**Kebijakan Publik**” menyatakan bahwa:

“Kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian. Anderson mencatat lima implikasi dari konsepnya mengenai kebijakan publik tersebut. Pertama, kebijakan publik adalah tindakan yang berorientasi tujuan. Kedua, kebijakan publik berisikan rangkaian tindakan yang diambil sepanjang waktu. Ketiga, kebijakan publik merupakan tanggapan dari kebutuhan akan adanya suatu kebijakan mengenai hal-hal tertentu. Keempat, kebijakan publik merupakan gambaran dari kegiatan pemerintah senyatanya, dan bukan sekedar keinginan yang akan dilaksanakan. Kelima, kebijakan pemerintah dapat merupakan kegiatan aktif atau pasif dalam menghadapi suatu masalah”.

Sedangkan menurut **Cari V. Patton** dan **David S. Swawicki** yang dikutip oleh **Dr. Abd Halil** dan **Prof. Dr. Thaja** dalam bukunya **Kebijakan Publik** mengemukakan bahwa:

“Kebijakan (*policy*) adalah *a settled course of action to be followed by a government body or institution* atau serangkaian tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau institusi. Setiap kebijakan mengandung ramalan yaitu prediksi dan proyeksi tentang sesuatu yang akan atau dapat terjadi dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan tindakan, fungsi, usaha dan tanggungjawab dari badan publik atau swasta.”

Sedangkan menurut **Nugroho D. (2003:97-159)** dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi** menyatakan bahwa:

“Kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, Keputusan Bupati, misalnya, adalah kebijakan publik yang dapat dibuat dengan memakan waktu tertentu. Kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, Keputusan Walikota, Keputusan Bupati, misalnya, adalah kebijakan publik yang dapat dibuat dengan memakan waktu tertentu. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan public penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepada Dinas, dan lain-lain.”

Kebijakan publik mengacu pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan publik melibatkan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi tindakan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu dan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Keputusan tersebut dapat berupa peraturan, undang-undang, program, atau langkah-langkah lain yang mempengaruhi cara kerja pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik menurut **Carl Friedrich** yang dikutip oleh **Indiahono (2017:18)** dalam buku **Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis**, kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan

adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut **William Dunn (2001)** yang dikutip oleh **Dr Abd Halil** dan **Prof. Dr. Thaja (2019:123)** dalam buku **Kebijakan Publik** mengemukakan bahwa:

“Kebijakan publik adalah serangkaian pilihan Tindakan-tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kepentingan kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan publik atau lembaga - lembaga pemerintah, diformulasikan dalam bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik diantara kelompok”.

Pengertian kebijakan publik menurut **George C. Edward III** dan **Ira Sharkansky** yang dikutip oleh **Uddin B. Sore** dan **Sobirin (2017:34)** dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik**, kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

2.1.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang melibatkan konversi kebijakan menjadi hasil konkret di lapangan.

Implementasi menurut **Oktasari (2015:1340)** implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Selanjutnya menurut **Rifley dan Franklin** yang dikutip oleh **Winarno (2007)** dalam bukunya yang berjudul "**Kebijakan Publik, Teori dan Proses**" mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikut pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan”.

Kemudian implementasi kebijakan menurut **Nurdin Usman (2002:70)** dalam bukunya yang berjudul **“Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum”** mengemukakan “implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.

Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program.

Selanjutnya menurut **Nugroho Riant (2004 158-160)** dalam bukunya yang berjudul **“Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi** mengatakan bahwa

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain”.

Selanjutnya menurut **George Edward III** dalam **Wahab (1990:124)** yang dikutip oleh **Dr Abd Halil** dan **Prof. Dr. Thaja (2019:166)** dalam buku **Kebijakan Publik** mengemukakan bahwa:

“Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap diantara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan

pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat sebagai unsur sasaran yang terlibat atau terkena kebijakan publik tersebut”.

Suatu kebijakan publik pada dasarnya sebagai suatu tahapan untuk menerapkan atau mengimplementasikan berbagai rencana, program dan kegiatan dengan mengerahkan berbagai sumber daya kebijakan untuk mencapai manfaat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegagalan implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuannya bukan disebabkan karena kebijakan yang telah ditetapkan tidak tepat, melainkan dikarenakan proses implementasinya yang tidak konsisten dan bahkan didukung oleh berbagai faktor yang telah dipersyaratkan dalam kebijakan publik dalam bentuk unsur-unsur dan faktor strategis bagi kelancarannya.

2.1. 6 Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka analisis proses implementasi kebijakan, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan, sehingga dapat dijelaskan perilaku yang terjadi di dalamnya. Implementasi adalah sebuah konsep di mana ada sejumlah model yang ditawarkan. Masing masing model tersebut tidak menawarkan sejumlah prinsip yang berlawanan, melainkan hanya sedikit perbedaan dalam beberapa hal dan jumlah variabelnya. Model yang ditawarkan berusaha memberi gambaran khususnya terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi proses implementasi. Peneliti akan memaparkan beberapa model

implementasi kebijakan. Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan:

1. Teori implementasi kebijakan George C. Edward III 1980

Model teoritik mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III itu mencakup empat faktor atau variabel di mana masing masing faktor memiliki keterkaitan erat satu sama lainnya. Meskipun demikian diantara keempat faktor tersebut ada yang sering dianggap lebih penting yaitu faktor komunikasi dan sumber daya organisasi. Meskipun demikian secara teoritik masing-masing faktor tersebut diasumsikan memiliki peranan yang sama sama penting dalam keseluruhan proses implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan menurut **George C. Edward III (1980:48)** yang dikutip oleh **(Indiahono, 2017:31)** dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis***, implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

- a. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (Kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b. Sumberdaya, Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang

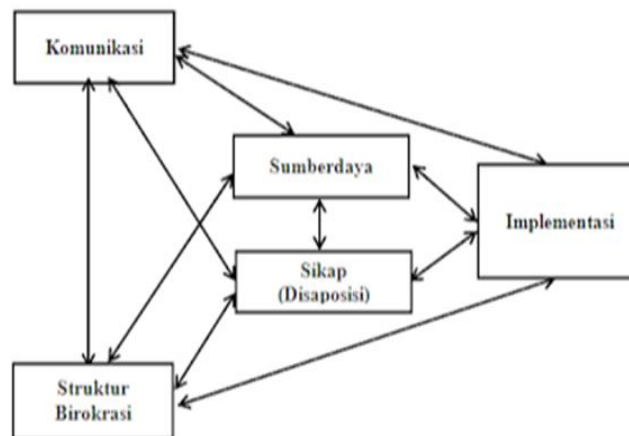
dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya sedangkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam atas program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, tertalu hirarkhis dan birokratis.

Kempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain.

Misalnya saja, implementor yang tidak jujur akan mudah sekali melakukan *mark up* dan korupsi atas dana program/kebijakan dan program tidak dapat optimal dalam mencapai tujuannya. Begitupun ketika watak dari implementor kurang demokratis akan sangat mempengaruhi proses komunikasi dengan kelompok sasaran. Model dari George C Edward III ini dalam dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Model Implementasi George C. Edward III



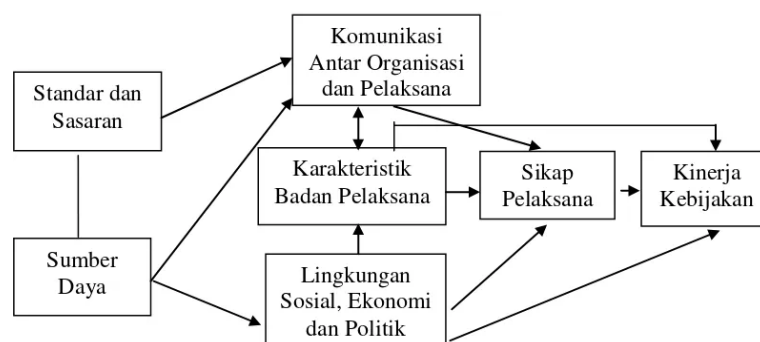
Sumber: *Edward III, 1980:48 dalam Indiahono 2017:33*

2. Teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975)

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh van Meter dan van Horn (1975: 145) mencakup tujuh variabel yang membentuk ikatan (*linkage*) antara kebijakan. Teori implementasi kebijakan menurut **Van Meter** dan **Van Horn (1975)** yang dikutip oleh (**Indiahono, 2017:38**) dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis**, menetapkan beberapa variabel yang diyakini dapat memengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan.

- a. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
- b. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal
- c. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
- d. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/ kebijakan. Dalam contoh di muka disebutkan bahwa koordinasi antara kelompok pendamping, LKMD, kepala desa dan aparat desa telah berhasil meyakinkan dan menjelaskan dengan baik arti penting IDT, sehingga kelompok sasaran mampu memahami dan bertanggung jawab atas program yang dijalankan.
- e. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- f. Lingkungan Sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
- g. Sikap Pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

Gambar 2. 2 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter and Van Horn, 1975:463

Model dari Meter dan Horn menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain.

2.1.7 Konsep Stunting

Menurut **Sudargo 2016** yang dikutip oleh (**Rahayu A. et.al 2018**) dalam **Buku Stunting dan Upaya Pencegahannya** stunting adalah kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umunya (yang seusia). Stunted (*short stature*) atau tinggi/panjang badan terhadap umur yang rendah digunakan sebagai indikator malnutrisi kronik yang menggambarkan riwayat kurang gizi balita dalam jangka waktu lama.

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia dua tahun, di mana keadaan gizi ibu dan anak merupakan faktor penting dari pertumbuhan anak.

Periode 0-24 bulan usia anak merupakan periode yang menentukan kualitas kehidupan sehingga disebut dengan periode emas.

Ketika anak mengalami stunting, pertumbuhan tulang dan ototnya terhambat, sehingga anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari yang seharusnya sesuai dengan usianya. Stunting dapat berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak, baik fisik maupun kognitif. Anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap penyakit infeksi, penurunan fungsi kognitif, rendahnya produktivitas di kemudian hari, dan rentan terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan lainnya.

Pertumbuhan dapat dilihat dengan beberapa indikator status gizi. Secara umum terdapat 3 indikator yang bisa digunakan untuk mengukur pertumbuhan bayi dan anak, yaitu indikator berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang diakibatkan oleh kekurangan zat gizi secara kronis. Hal ini ditunjukkan dengan indikator TB/U dengan nilai skor-Z (Z- score) di bawah minus 2 (**Rahayu A et.al 2018**).

2.1.8 Faktor Penyebab Stunting

Stunting disebabkan oleh masalah asupan gizi yang dikonsumsi selama kandungan maupun masa balita. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum masa kehamilan, serta masa nifas, terbatasnya layanan kesehatan seperti pelayanan antenatal, pelayanan postnatal dan rendahnya akses makanan bergizi, rendahnya akses sanitasi dan air bersih juga merupakan penyebab stunting (**Wahdan S 2012**). Faktor Penyebab stunting juga dipengaruhi oleh pekerjaan ibu,

tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan pemberian ASI eksklusif, masalah kesehatan pada anak kebiasaan makan makanan instan (Yumawanti 2021). Faktor lain seperti pendidikan ibu, pengetahuan ibu mengenai gizi, pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan zink dan zat besi, riwayat penyakit infeksi serta faktor genetik (Ardiyah et.al 2015).

2.1.9 Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi gagal tumbuh secara optimal pada anak, yang ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat, terutama dalam hal tinggi badan (tinggi badan pendek) dibandingkan dengan usia anak tersebut. Tujuan dari pencegahan stunting adalah untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal sehingga mereka dapat mencapai potensi fisik dan kognitif yang penuh. Pencegahan dan penanggulangan stunting melibatkan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan gizi dan nutrisi anak, promosi pola makan yang sehat, pendidikan gizi kepada ibu dan keluarga, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, perbaikan sanitasi dan kebersihan lingkungan, serta upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan stunting dapat dicegah dan diperbaiki untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal.

Usia 0–2 tahun atau usia bawah tiga tahun (batita) merupakan periode emas (*golden age*) untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada masa tersebut terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Periode 1000 hari pertama sering

disebut *window of opportunities* atau periode emas ini didasarkan pada kenyataan bahwa pada masa janin sampai anak usia dua tahun terjadi proses tumbuh-kembang yang sangat cepat dan tidak terjadi pada kelompok usia lain. Gagal tumbuh pada periode ini akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan pada usia dewasa.

Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan masalah stunting ini mengingat tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan stunting, melalui Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Peningkatan Percepatan Gizi dengan fokus pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan (**Kemenkes RI, 2013**), yaitu sebagai berikut:

1. Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil
3. Pemenuhan gizi
4. Persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli
5. Pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan
7. Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk bayi diatas 6 bulan hingga 2 tahun
8. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A
9. Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu terdekat
10. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2.1.10 Program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber)

Ketahanan pangan keluarga saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan masyarakat terhadap sayuran dan daging yang dikonsumsi juga terus meningkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan, yaitu dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Budidaya ikan dalam ember merupakan teknologi pengembangan dari akuaponik, dimana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Budikdamber merupakan salah satu program, inovasi di bidang perikanan. memberikan solusi bagi masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan terbatas untuk tetap dapat melakukan budidaya ikan dan sayur dalam satu wadah menggunakan ember. Solusi tersebut didapat untuk mengatasi permasalahan lahan untuk mengembangkan tanaman dan ikan. Budikdamber cocok digunakan di ruang pekarangan yang semakin sempit dan kualitas serta kuantitas airnya semakin menurun. Budikdamber dapat digunakan untuk memecahkan solusi pangan masa depan. Banyak kelebihan yang didapatkan dengan budidaya ikan dalam ember karena tidak memerlukan listrik, tidak memerlukan banyak air dan suplai oksigen maupun sirkulasi air.

Melalui program budidaya ikan dalam ember menjadi salah satu langkah dalam pencegahan stunting (keterlambatan pertumbuhan) pada anak-anak. Sebab dengan adanya program budikdamber diharapkan masyarakat dapat mengetahui cara merakit media budikdamber dan melakukan budidaya ikan dan sayur sehingga dapat menghasilkan ikan dan sayur yang dapat membantu kebutuhan rumah

tangganya akan kecukupan sumber protein dan zat besi. Tercukupinya protein dan zat besi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting pada anak.

Budidaya ikan dalam ember dapat menjadi teknik budidaya perikanan yang memberikan peluang bisnis dan ekonomi yang menguntungkan serta meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu, budikdamber juga ramah lingkungan karena bahan pembuatan budikdamber dapat diperoleh dari barang-barang bekas yang masih dapat dimanfaatkan seperti ember bekas dan gelas plastik bekas yang digunakan sebagai penanam. Dengan cara ini, masyarakat secara tidak langsung berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan dari bahan-bahan anorganik yang tidak dapat terurai dengan sendirinya. Teknologi Budikdamber juga tidak menghasilkan zat berbahaya bagi lingkungan. Selain itu, air limbah bekas budikdamber dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair organik bagi tanaman. Apabila dikelola dengan baik, pemanfaatan budikdamber diharapkan dapat menghasilkan produk yang bernilai ekonomi dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Keuntungan yang diraih tentunya berbeda-beda tergantung dari jumlah jenis ikan lele yang dibudidayakan.

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan pemikiran atau argument dari peneliti dalam menyajikan penelitian yang akhirnya melahirkan asumsi-asumsi atau proposisi dan teori yang relevan dengan masalah penelitian. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Pada penelitian ini, peneliti mengacu kepada pendapat ahli mengenai teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian

dan lokus penelitian, sebagai dasar dan panduan ini sesuai kenyataan dilapangan, sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang objektif berdasarkan masalah-masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti mengemukakan teori-teori dari para ahli yang berikutnya akan ditetapkan sebagai kerangka berpikir.

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan ketahanan pangan dan gizi yang masih belum terselesaikan di masyarakat, hal ini menyebabkan adanya permasalahan stunting yang diderita oleh anak balita di Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan stunting ini. Kebijakan tersebut dibuat dalam suatu Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Terintegrasi. Melalui kebijakan tersebut dalam penurunan dan pencegahan stunting menjadi tanggung jawab bersama setiap instansi untuk ikut serta dalam penurunan dan pencegahan stunting. Karena penanganan stunting memerlukan kerjasama semua sektor.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat sebagai salah satu sektor pemerintahan yang merealisasikan program budidaya ikan dalam ember (budikdamber) sebagai intervensi korvensensi dalam pencegahan stunting pada pasal tiga pilar empat “mendorong ketahanan pangan dan gizi keluarga”. Kegiatan budidaya ikan dan sayur dengan media ember sebagai pemanfaatan pekarangan lahan sempit yang bisa dilakukan di pekarangan rumah. Hasil panen dari ikan dan sayur bermanfaat untuk dikonsumsi sebagai langkah dalam menjaga ketahanan

pangan dan gizi keluarga, sehingga menjadi salah satu tombak dalam pencegahan stunting di Kabupaten Bandung Barat.

Namun berdasarkan observasi awal dan wawancara langsung, yang telah dilakukan, penulis menemukan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan program budidaya ikan dalam ember, diantaranya: pertama, sosialisasi program budidaya ikan dalam ember belum berjalan sesuai yang diharapkan, penyuluhan program budidaya ikan dalam ember tidak bersifat berkesinambungan. Kedua sumber daya berupa anggaran dari pemerintah belum memadai. Ketiga komitmen dari penyuluhan yang masih setengah-setengah dalam melaksanakan sosialisasi pada masyarakat pelaksana program tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model teori implementasi kebijakan menurut **George C. Edward** yang dikutip oleh (**Indiahono, 2017:31**) dalam bukunya yang berjudul **Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis**, terdapat empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (Kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- b) Sumberdaya, Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalam implementor, kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan

lambat dan seadanya sedangkan, sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

- c) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam atas program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
- d) Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengamblian keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari "virus weberian" yang kaku, tertalu hirarkhis dan birokratis.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pencegahan stunting dengan menerapkan program budidaya ikan dalam ember di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat perlu dianalisis secara mendalam menggunakan teori implementasi kebijakan menurut **George C. Edward III** (dalam **Indiahono, 2017:31**) karena peneliti menganggap teori ini paling relevan dan memadai dengan indikasi penelitian.



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

Sumber: (George C. Edward III (dalam Indiahono, 2017:31)

2.3 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikemukakan diatas, maka penulis mengemukakan proposisi penelitian Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting Dengan Menerapkan Program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat dapat ditentukan melalui teori implementasi kebijakan **George C. Edward III** (dalam **Indiahono 2017:31**) yang terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terdiri dari: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.